

## Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura

Ali Topan

(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

[alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id)

### Abstract

*Political-religious being a social dynamic cannot be separated from our lives as social and religious beings. In the social and cultural context of the Madurese, ulama are important actors in the social life of the Madurese in resolving conflicts and eradicating ideas that are not in accordance with Islamic teachings and state ideology. The presence of the ulama here, apart from being a preacher, also acts as an intermediary in regulating the lives of the Madurese wabil people specifically in Pamekasan. Social phenomena that occur in Pamekasan Madura are always responded quickly by the Madurese ulama alliance as a movement with the aim of controlling and regulating the symptoms that occur in the Pamekasan community. such as, closing nightclubs and tourist attractions that are not in accordance with Islamic law and the existing culture in Madura. The pattern of movement used by the Madura Ulama Alliance (AUMA) in responding to political-religious issues uses persuasive, preventive and repressive patterns. The impact of this movement is evidence that in Pamekasan there is minimal escalation of political-religious conflict compared to other regions, this is in line with the Pamekasan district jargons "Pamekasan Hebat" and "Pamekasan Pintu Salam." While the writing of this paper uses a literature study with a descriptive qualitative method of analysis that utilizes primary and secondary data sources in the form of books, journals, theses and online media. Such as, news.okezon, compas.com, indopers.net, nasional.tempo and others.*

**Keywords:** Response, AUMA, Political-religious

### Abstrak

Politik-keagamaan menjadi dinamika sosial tidak lepas dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial dan beragama. Dalam konteks sosial dan budaya orang Madura, ulama menjadi aktor penting ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Madura dalam menyelesaikan konflik dan memberantas paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan paham kenegaraan. Hadirnya ulama disini, selain sebagai pendakwah juga sebagai penengah dalam mengatur kehidupan masyarakat Madura *wabil khusus* di Pamekasan. Pergolakan sosial yang terjadi di Pamekasan Madura selalu di respons cepat oleh aliansi ulama Madura sebagai gerakan dengan tujuan menertibkan dan mengatur gejala-gejala yang terjadi ditengah masyarakat Pamekasan. seperti, penutupan tempat hiburan malam dan tempat wisata yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan budaya yang ada di Madura. Pola gerakan yang digunakan oleh aliansi ulama Madura (AUMA) dalam merespons isu politik-keagamaan menggunakan pola persuasive, preventif dan represif. Dampak dari gerakan ini menjadi bukti bahwa di Pamekasan eskalasi konflik politik-keagamaan minim terjadi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini selaras dengan jargon kabupaten Pamekasan "Pamekasan Hebat" dan "Pamekasan Gerbang Salam." Sedangkan penulisan paper ini menggunakan studi pustaka dengan metode kualitatif deskriptif analisis yang memanfaatkan Sumber data primer dan skunder berupa buku, jurnal, skripsi dan media online. Seperti, news.okezon, compas.com, indopers.net, nasional.tempo dan lain-lain.

**Kata Kunci :** Respons, AUMA, Politik-keagamaan

Received : 2021-12-24;

Revised: 2022-06-14;

Accepted: 16-06-2022

© ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu

<https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>

Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia



## Pendahuluan

Secara sosiologis, gerakan kelompok keagamaan di Pamekasan jauh lebih banyak dibanding daerah kabupaten lain, seperti Bangkalan, Sampang dan Sumunep. Pembedanya terletak pada banyaknya organisasi keagamaan di Pamekasan, mulai dari NU dan Muhammadiyah. Selain itu, banyak organisasi yang masih eksis di Pamekasan, Seperti, Persatua Islam, al-Irsyad, dan Hidayatullah. Dari enam organisasi tersebut, terdapat tiga ormas Islam yang hingga sekarang tercatat sebagai kelompok paling dominan. Ketiganya adalah NU, SI, dan Muhammadiyah (Abd A'la, dkk, 2018). Masyarakat Madura dalam kebudayaannya mempunyai penghormatan dan pengakuan cukup besar terhadap simbol-simbol keagamaan. Faktanya, ada beberapa simbol keagamaan seperti pesantren, kiai, dan ormas keislaman. ketiganya adalah realitas keislaman yang dikenal lekat dengan kehidupan masyarakat Madura. Bukan hanya saja sektor keagamaan, namun juga pada aspek sosial lain seperti pendidikan, ekonomi, bahkan pada ranah paling tabu seperti politik (Syarif & Hannan, 2020).

Penelitian tentang Madura khususnya di Pamekasan sebenarnya sering dilakukan, baik dari aspek sosiologi, agama maupun aspek politik. Dari aspek gerakan politik dan Agama pernah diteliti oleh Abd Hannan dan Erie Haryanto, *Neo Sufesme dan Gerakan Sosial Agama dan Politik di Madura* (2019), objek penelitian yang dilakukan Abd Hannan dan Erie Haryanto fokus pada gerakan Islamisme aliansi ulama Madura (AUMA) dalam dinamika sosial agama masyarakat Madura. Dalam realitas sosial budaya masyarakat Madura selain kental dengan hierarki, juga dikenal dengan sistem dan struktural sosial yang identik dengan nilai-nilai keagamaan. Terutama yang berpusat pada simbol keagamaan seperti kiai, pesantren dan ormas keislaman. Dalam konteks ini, harus diakui unsur-unsur politik dan keagamaan yang terbangun nama besar kiai, pesantren, dan organisasi sosial keagamaan, seperti Aliansi Ulama Madura (AUMA). Nyatanya tidak saja mengambil tempat dan proses transformasi sosial keagamaan, namun turut pula andil jalannya kekuasaan dan dinamika sosial politik di daerah setempat khususnya di Pamekasan Madura, terutama dalam bidang isu sosial-politik dan Agama (Hannan & Haryanto, 2019).

Bedanya penelitian ini dengan peneliti terdahulu lebih kepada metodologi yang digunakan meskipun objeknya sama mengenai AUMA. Pembedanya disini, peneliti terdahulu sumber datanya menggunakan data wawancara terhadap pimpinan AUMA. Sedangkan penulis menggunakan sumber data media online yang sudah di shere dan di dukung sumber lain seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Menurut peneliti, sangat

manarik ketika mengamati pemberitaan di media sosial setelah kejadian yang disajikan beranika ragam oleh media online. Selain itu, peneliti juga mengamati dampak dari respons AUMA seperti respons terhadap Habib Rezieq Shihab dan penutupan tempat hiburan malam yang ada di Pamekasan.

Berangkat dari pemaparan diatas, penelitian mempunyai kepentingan khusus untuk mengkaji dan meneliti serta mendiskripsikan secara menyeluruh dan mendalam mengenai hal yang berkenaan dengan respons ulama Madura (AUMA) terhadap dinamika gerakan sosial politik dan agama dilingkungan masyarakat Madura khususnya Pamekasan.

## **Metodologi**

Dalam penulisan paper ini yang berjudul “Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) Terhadap Dinamika Politik-keagamaan di Pamekasan Madura” penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni memaparkan data secara deskriptif. Pendekatan kualitatif yang penulis pilih sebagai sebuah pendekatan dalam tulisan ini karena penulis ingin menjelaskan secara deskriptif analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dan menceritakan kembali (Jajat, 2018). Penulis memiliki peran sangat penting untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, penulis harus memahami betul yang sedang dikaji, agar penulis mampu menganalisis data yang diperoleh secara maksimal. Suharsimi mendefinisikan, sumber data adalah subyek yang dapat memberikan informasi data (Arikonto, 2010).

Sumber data primer dan skunder dalam tulisan ini berupa buku, jurnal, skripsi, tulisan dan media online seperti, news.okezon, compas.com, koran madura, indopers.net, nasional.tempo dan lain-lain. Cara analisis data dalam tulisan ini. *Pertama*, Reduksi data, proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan serta mentransformasikan data yang diperoleh. *Kedua*, Penyajian data, penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif bukan angka-angka.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah Aliansi Ulama Madura (AUMA) di Pamekasan Madura**

Belakangan ini gerakan yang membawa nama agama (Islam) cenderung diasosiasikan dengan gerakan yang berorientasi politik. Sementara perjuangan organisasi yang menggunakan cara trasformatif dan damai seringkali tidak sebut “Gerakan Islam” melainkan disebut organisasi (Widigdo, 2018). sedangkan Gerakan islamisme Aliansi

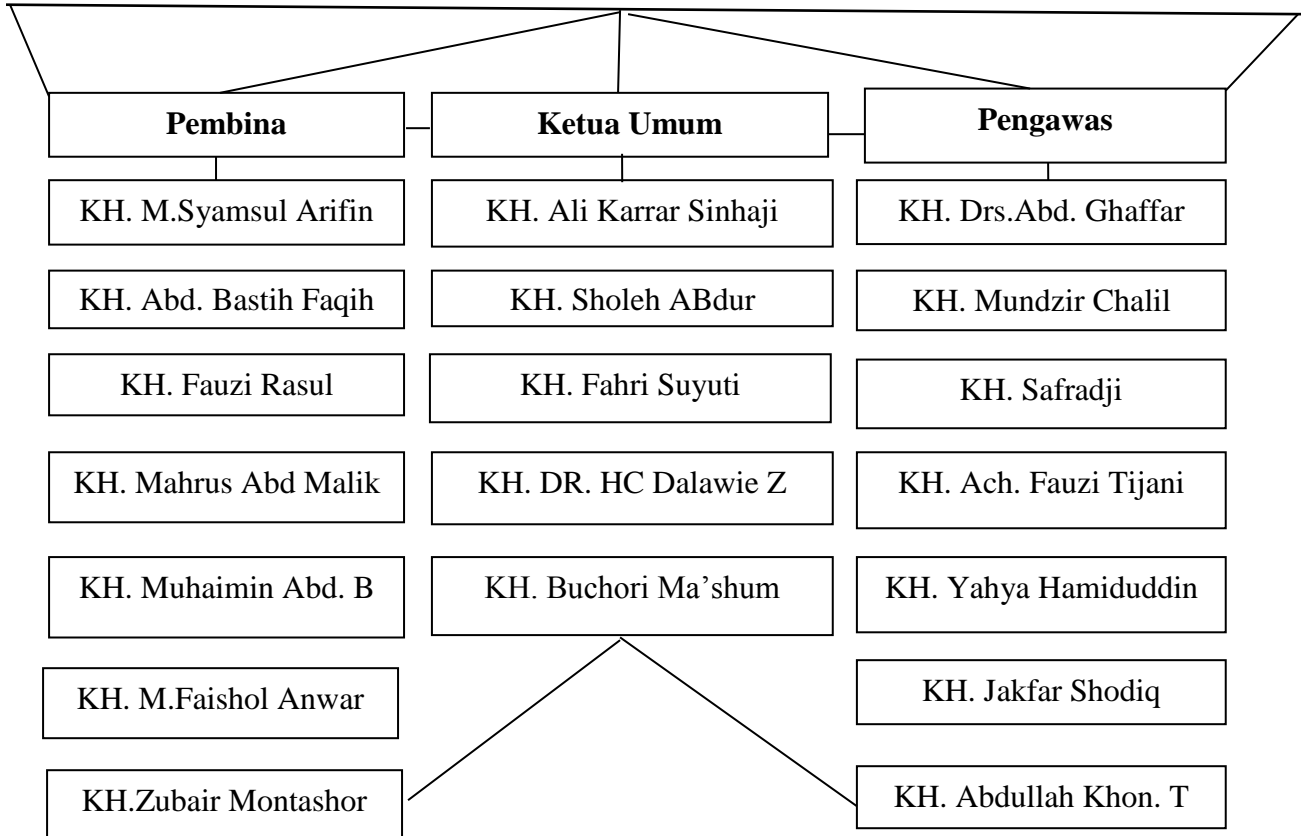
Ulama Madura (AUMA) adalah merupakan perkumpulan Ulama/Kiai lokal Madura. Di lansir dari Pejuangislam.com, aliansi Ulama Madura dideklarasikan di pondok Pesantren Nurul Kholil Bangkalan Madura yang diasuh oleh KH. Zubair Muntashor, pada bulan Oktober 2015 (Pejuangislam.com, 2020). Namun secara kepengurusan ditingkat pusat, AUMA sebenarnya sudah terbentuk sejak tanggal 21 Juli 2015 di PP Darul Ulum Banyuwang Pamekasan Madura. Menariknya, sekalipun AUMA diresmikan di Bangkalan, tetapi kantor Pusat AUMA sendiri bertempat di Pamekasan, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Abd A'la, dkk, 2018).

Lahirnya suatu gerakan keagamaan dipengaruhi oleh faktor kemerosotan ekonomi, disintegrasi budaya, penindasan terhadap kelompok maupun politik (Halim, 2017). Selain itu, isu yang paling sensitif dan direspons cepat oleh masyarakat adalah isu terkait dengan identitas (agama). Seperti kejadian 17 Juli 2015 di Tolikara, pembakaran tempat ibadah orang muslim (Abu Bakar, 2016). Begitupun juga lahirnya Aliansi ulama Madura dilatar belakangi oleh perlunya wadah merespons isu-isu krusial keislaman dan sosial politik, baik isu keislaman di level lokal maupun nasional. Secara umum, selain faktor krusial tersebut dapat dikategorikan pada kelahiran AUMA didorong oleh ragam persoalan keislaman yang pada saat itu menimpa berbagai penjuru Indonesia. Salah satu isu yang paling krusial peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara, Papua. pembakaran Masjid ini menjadi pendorong lahirnya AUMA.

Respon yang dilakukan oleh aktivis Islam merupakan bentuk kritik terhadap negara dalam mengelola tatakehidupan sosial, politik, ekonomi dan agama. Sehingga mencoba menawarkan gagasan baru dari apa yang selama ini dipikirkan oleh negara, semacam bentuk solusi yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan Al-hadist (Nu'ad, 2016). Pandangan seperti ini, melihat Islam tidak hanya sebagai ideologi yang tidak hanya diterapkan di wilayah politik, akan tetapi diterapkan dalam segala dimensi kehidupan masyarakat mulai dari cara pendidikan, pemerintahan, sistem sosial, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi (Zuhri, 2022). Fenomena dalam dinamika keislaman dilatar belakangi dua peristiwa besar atau sejarah. *Pertama*, formalisasi agama atas marginalisasi selama rezim otoriter. Kejadian ini merupakan potret kaum muslim ketidakberdayaan dalam tekanan kekuasaan rezim yang berkuasa. Dengan demikian, kaum muslim melakukan protes atau perlawanan terhadap rezim yang tidak mampu menjawab dari sekian banyak persoalan yang dialami oleh masyarakat banyak, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan. *Kedua*, disebabkan oleh praktek kapitalisasi

agama. Dalam kaitannya, Islam dipandang sebagai komodifikasi agama demi memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi (Hannan, 2018).

**Struktur Pengurus Aliansi Ulama Madura (AUMA) Periode 2016-2020, Diambil dari Jurnal Abd A'la 2018**



**Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap Dinamika Politik dan sosial-keagamaan di Madura Pamekasan**

Dalam menganalisis dinamika politik di Indonesia terlebih dahulu memahami karakteristik masyarakatnya, meliputi etnisitas, agama dan militer (Widyawati, 2014). Isu keagamaan dan politik sering muncul menghiasi wacana pemikiran Islam di Indonesia khususnya di Pamekasan. Kontestasi antara kaum nasionalis, religius dan religius konservatif dalam wacana politik di Indonesia. Politik identitas yang dibangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok Islam yang mengokohkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan dan memberantas yang lain. Dalam studi-studi gerakan sosial, terminologi politik identitas mengacu pada gerakan yang berusaha membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya (Maarif, 2012). Sedangkan munculnya politik identitas dalam dinamika sosial tidak lepas dari rasa

ketidakadilan dan persamaan hak yang dianggap oleh masing-masing kelompok atau golongan terhadap kelompoknya (Lestari, 2018). Dampaknya pembiaran terhadap konflik yang diakibatkan oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan dalam bersosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, yang sama-masa mewakili kelompoknya sendiri.

Respons ulama Madura mengenai isu politik dan agama yang terjadi di Pamekasan maupun di tingkat pusat seperti halnya isu mengenai Habib Rizieq Shihab, dimana ribuan santri dan ulama Madura melakukan demo di depan Polres Bangkalan menuntut keadilan yang menimpa Habib Rizieq. Kejadian ini, tidak hanya santri dan ulama yang berdemonstrasi, tetapi wali santri ikut hadir dan menuntut keadilan kasus yang dialami oleh Habib Rizieq. Menurut perwakilan aksi, bahwa kasus kerumunan yang di sangkakan kepada Habib Rizieq dianggap tidak adil dan lebih bermuatan politik ([/news.okezone, 17/12/2020](#)). Aksi juga terjadi di Sampang, kordinator aksi KH. Yahya Hamiduddin menyampaikan apresiasi kepada para tokoh, ulama serta Habaib yang ikut serta dalam aksi di Sampang, agar HRS dibebaskan ([indopers.net, 16/12/2020](#)). Hal yang sama terjadi di Pamekasan, aksi yang mengatasnamakan persatuan umat Islam, tidak terima pemanggilan terhadap HRS dan meminta Menko Polhukam Pak Mahfud MD tidak terlalu mengomentari kasus Habib Rizieq Shihab ([nasional.tempo.com, 01/12/2020](#)). Pemberitaan yang sama dilansir dari Suara.com, Aliansi Ulama Madura mendatangi komisi III DRI RI, meminta Habib Rizieq dibebaskan tanpa syarat. Menurut sekjen AUMA KH. Fadholi Muhammad Ruham, empat tahun penjara dan dua tahun putusan kasasi, sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan bagi HRS ([Suara.com, 7/12/2021](#)). Aliansi ulama Madura (AUMA) tidak hanya merespons kasus HRS, tetapi juga merespons penistaan Agama Islam yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri, dalam pernyataannya membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama yaitu Soekarno ([madura.tribunnnews.com, 22/11/2019](#)).

Respons Aliansi ulama Madura (AUMA) tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga sangat gencar sekali dalam merespons isu yang terjadi di tingkat lokal khususnya di Pamekasan, seperti yang terjadi polemik penutupan tempat hiburan KCM, meski sampai sekarang masih beroperasi. Ratusan massa yang tergabung dalam Laskar Pembela Islam (LPI) menuntut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menutup cinema mall (KCM) yang berada di jalan sentol Pamekasan yang di klaim sebagai tempat sarang maksiat ([Koranmadura.com, 14/2/2020](#)). Selain cinema mall, terjadi penutupan tempat wisata Bukit

Bintang di Desa Larangan Badung, diduga sama dengan sinema mall yaitu dianggap tempat maksiat (regional.compas.com, 05/10/2020).

Dinamika sosial yang di paparkan diatas, ada kaitannya dengan sistem sosial di pamekasan secara umum Madura. Yang mana, sistem sosial yang dianut oleh orang Madura diambil dari pepatah "*Buppha' Babbu' Guruh Rato*," yang berarti "orang tua, guru, penguasa" ungkapan ini menggambarkan strata sosial yang ada di pulau Madura. *Buppha' Babbu'* (orang tua) mewakili keluarga, yakni struktur mikro dalam sebuah masyarakat. Sedangkan *rato* (penguasa) mewakili struktur makro, yakni pemerintah. Adapun *guruh* (guru), mewakili struktur tengah yang menjebatani antara struktur mikro dan makro (Afdillah, 2016).

Keluarga adalah unsur utama dalam struktur sosial masyarakat Madura. Keluarga merupakan pilar paling urgen yang harus dijaga kehormatannya sehingga seseorang akan menjadi bangga dengan keluarga besarnya. Kepatuhan kepada orang tua (bapak dan ibu) diposisikan tingkat paling atas. Karena terdapat struktur religio-kultural yang menstruktur berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan (Hefni, 2007). Dalam konteks tertentu, orang Madura dalam menghormati orang lain sama halnya dengan menghormati seluruh keluarga. Dan sebaliknya, menghina seseorang sama halnya dengan melukai semua keluarga.

Struktur kedua adalah *Ghuru* (guru), guru lebih dikenal dengan sebutan Kiai atau Uatadz. Secara sosial, Kiai mempunyai peranan penting di Madura. Ia adalah tenaga pendidik dan mengajarkan pengetahuan agama, yang memberikan tuntunan dan pedoman dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Bagi orang Madura, kiai, Habaib dan Ustadz tidak boleh di hina dan harus di hormati, dimuliakan serta takdim terhadapnya, dikarenakan mereka memiliki sesuatu yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Kepercayaan masyarakat Madura kepada Kiai dalam urusan agama dan sosial, sehingga menempatkan Kiai ditengah-tengah masyarakat Madura terletak pada posisi yang strategis. Tidak hanya urusan agama, akan tetapi berkaitan langsung dengan urusan sosial politik, serta kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat banyak (Alim, 2016). Peran elit berlatar belakang Kiai di Madura sangat kuat dan dominan, mengingat warga Madura sebagian besar adalah *nahdliyin* dan berlatar pendidikan pesantren (Rosyadi & Azhar, 2016). Maka tidak jarang para politikus melakukan safari ke pesantren, lembaga atau Madrasah dan guru ngaji. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meminta barokah dan dukungan politik agar kepercayaan masyarakat terhadapnya semakin tinggi. Faktanya, jika kiai sudah menentukan pilihan politik, secara otomatis

masyarakat ikut apa kata kiai. Karena kiai sebagai panutan agama dan orang yang sangat dihormati dalam elemen masyarakat Madura.

Struktur ketiga adalah *Rato* (pemerintah), dalam artian masyarakat Madura hormat dan patuh kepada pemerintah atau pemegang kekuasaan (Faridi, 2021). Dilihat dari konteks sejarah, nasionalis masyarakat Madura tidak bisa diragukan lagi. Pasca pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942, gerak pemerintahan di Madura di pegang oleh Residen Belanda dan ibu kotanya terletak di Kabupaten Pamekasan, Residen Belanda membawahi tiga Kabupaten, Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan, sedangkan Sampang Statusnya berupa kawedanan yang berada dibawah naungan atau bawahan Pamekasan. Tentu saja, sebagai ibu kota karesidenan Madura, kehidupan masyarakat Pamekasan tidak lepas dari gejolak sosial politik dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang menguasai daerah Madura. Setelah dikumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945, di Madura terjadi penurunan pendera Jepang, di Bangkalan dipimpin oleh kapten Amuninggar, sedangkan di Pamekasan dan sekitarnya di pimpin oleh K.H Jakfar dan dibantu Kapten Sulaiman (Raditya, 2020).

Pengorbanan masyarakat Madura dalam mempertahankan kemerdekaan RI tidak hanya sekedar berupa materi akan tetapi nyawapun menjadi taruhannya. Terbukti ketika persetujuan Lingkarjati gagal maka Madura dinyatakan bahaya perang melawan kolonial Belanda yang mempunyai inisiatif menguasai kembali daerah Madura. Melihat kedatangan Belanda pada tanggal 4 Agustus tahun 1947 di daerah Bangkalan, pasukan pejuang langsung respon cepat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda, maka terjadilah pertempuran antara kedua pihak sehingga dalam pertempuran itu memakan korban, salah satunya yaitu Letnan Kaffa dan Kopral R.P Achmad (Asiyah, 2020).

Maka dari itu, dari tiga struktur diatas bagi masyarakat Madura tidak bisa dipisahkan, karena ketiga struktur tersebut satu dengan yang lain saling berkaitan, saling mengisi dan saling melengkapi dalam ranah sosial, politik, agama dan pemerintah. Karena dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai aktor sekelompok individu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam menentukan kehidupan dan perubahan. (Kosim, 2007). Dikalangan masyarakat Madura, aktor tersebut adalah orang tua, Kiai/Ulama dan pemerintah.



## **Pola Gerakan Aliansi Ulama Madura (AUMA) Dalam Merespons Dinamika Sosial dan Agama**

Dinamika sistem sosial masyarakat Madura bisa dibidang tradisional dan mempunyai sifat religius yang kuat. Kuatnya religius masyarakat madura bisa dilihat totalitas penggunaan simbol-simbol keagamaan, bahkan tidak jarang sikap totalitas mereka sering menghadirkan sikap sintimen terhadap kelompok yang tidak sepaham dengan mayoritas paham yang di anut oleh masyarakat Madura pada umumnya. Hal ini terbukti perilaku sintimen menghadirkan konflik antar golongan. Seperti, peristiwa konflik antar Sunni dan Syiah di Sampang Madura (Hannan & Abdillah, 2019). Sasaran utama dakwah Aliansi ulama Madura adalah memberantas paham keislaman yang tidak selaras dengan nilai ajaran Islam *Ahlussunnah waljama'ah*. Ragam paham yang dianggap melenceng seperti bermuatan ajaran Syi'ah, wahabi, liberal, dan penistaan agama. Strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menganut paham ini menggunakan strategi dengan membujuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan penyebar ideologi wahabi/salafi mereka, serta berusaha meminggirkan dan memusnahkan pengamalan Islam yang lebih toleran yang lebih lama ada dan dominan diberbagai belahan dunia muslim (Wahid, 2009).

Keempat paham diatas, menurut aliansi ulama Madura, hukumnya "haram" eksis dan di sebar luaskan (dakwah) di Pamekasan. Maka dari itu, isu yang berbau paham radikal, wahabi dan syiah selalu menjadi perhatian penting bagi AUMA. Terlepas dari permainan politik identitas, pada dasarnya mayoritas masyarakat Madura menganut paham *Ahlussunna Waljamaah* sebagai paham ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Ulma dan Kiai yang ada di Madura Pamekasan. Sebagai gerakan keislaman aliansi ulama Madura tidak hanya merespons tentang paham keagamaan tetapi juga merespons tempat hiburan malam yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Mengenai hal ini, ulama Madura setegas mungkin merespons secara persuasive dalam bentuk peringatan, atau preventif bahkan represif berupa penutupan paksa hingga aksi pengeledahan (Zamani, 2018). Alasan penting ulama Madura menutup paksa tempat hiburan yang ada di Pamekasan, dikerenakan banyak kasus-kasus penyimpangan yang sering dilakukan oleh para peminat hiburan seperti free sex, mengkomsi narkoba, mabuk-mabukan, hingga tindakan kriminal seperti pencurian yang dilakukan para pelakunya agar senantiasa menikmati hiburan tersebut.

Secara tekstual, upaya preventif merupakan pengendalian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dihari berikutnya. Sedangkan tindakan refresif

pencegahannya dilakukan dengan cara melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dianggap melanggar norma sosial dan Agama. Dengan adanya sanksi tegas ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku (Topan, 2020). Tindakan yang dilakukan oleh aliansi Ulama Madura (AUMA) tidak semerta-merta bertindak sepihak. Sebaliknya, mereka senantiasa menyelaraskan aksi dan tindakan sesuai dengan prosedur atau hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya Islam tidak melarang umatnya sesekali mengisi waktu luangnya untuk mencari hiburan dan menikmati permainan, akan tetapi tidak sembarangan hiburan dan permainan, melainkan hiburan dan permainan yang tidak keluar dari garis syariat Islam. Secara umum, hiburan dan permainan yang sesuai syariat Islam wajib memenuhi dua syarat. Pertama, hiburan/permainan itu haruslah halal secara syariah, misalnya olahraga lari, memanah, renang, dan sebagainya. Jadi tidak boleh hiburan atau permainan berupa sesuatu yang haram, baik haram dari segi zatnya seperti hiburan disertai minuman keras (miras). Ataupun haram dari segi aktivitasnya seperti perjudian, prostitusi, sek bebas, dan sebagainya. *Kedua*, hiburan dan permainan tidak melalaikan kita dari kewajiban. Missal kewajiban sholat, bekerja, menutup aurat, menuntut ilmu, berdakwah, dan sebagainya (Hosniah, 2018).

## Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa aliansi ulama Madura (AUMA) merupakan gerakan sosial dengan tujuan untuk merespons isi-isu sosial politik keagamaan di Madura khususnya di Pamekasan. Adapun isu yang direspons oleh AUMA berupa tempat hiburan malam, tempat wisata yang keluar dari batas syariat Islam dan isu yang berkaitan dengan Agama. Tidak hanya itu, AUMA juga merespons isu berbau politik baik tingkat lokal maupun tingkat nasional, seperti penangkapan terhadap ulama yang dianggap bersifat politis. Sedangkan pola yang digunakan AUMA dalam merespons isu sosial-politik keagamaan, menggunakan pola persuasive, preventif dan represif. Dampak gerakan ini. *Pertama*, menjadikan *government control* terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, minimnya eskalasi konflik dan isu sosial-keagamaan di Pamekasan, sesuai dengan jargon “Pamekasan Hebat, dan “Pamekasan Gerbang Salam”.

## Referensi

### Buku.

- Abdurrahman Wahid, (2009), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Desantra Utama Media.
- Achmad Muhibin Zuhri, (2022), *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, Lamongan: Academia Publication.
- Ahmad Syafii Maarif, (2012) *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project.
- Barmawi Jajat, (2018), *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*, Yogyakarta: Aruzz media.
- Irfan Abu Bakar, Dkk, *Laporan Penelitian Hate Speech: Ujaran Kebencian dan Penanganannya Oleh Polri dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, CSRC center for study of religion and culture.
- Khoirul Rosyadi & Nurul Azhar, (2016), *Madura 2045: Perayaan Peradaban*, Yogyakarta: PT. Likis Pelangi Aksara.
- Muhammad Afdillah, 2016 *Dari Masjid ke Panggung Politik*, Yogyakarta, Center Religious And Cross Cultural Studies, 2016.
- Nina Widyawati, (2014), *Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampaye JK-WIRANTO pada Pemilu 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Raneka Cipta 2010.

### Jurnal

- Abd A'la, Ahwan Mukarrom dan Mukhmmad Zamani, "Kontribusi Aliansi Ulama Madura (AUMA) Dalam Merespons Isu Keislaman Dan Keutamaan Di Pamekasan Madura, *Jurnal Studi Agama-Agama*", Vol. 8, No. 2, (2018), ISSN: (p) 2088-6330. <https://doi.org/10.15642/religlo.v8i2.793>.
- Abd Hannan & Erie Haryanto, "Neo Sufesme dan Gerakan Sosial Agama Pilitik di Madura", *Jurnal Proceedings of Annual Conference for Muslim Schalars (AnCoMS)*, (Desember 2019), E-ISSN: 2716-3199, DOIs: 10.36835/ancoms.
- Abd Hannan & Kudrat Abdillah, "Hegemoni Religu-Kekuasaan dan Trasformasi Sosial: mobilasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kiai dan Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2019), e-ISSN-2407-1684/p-ISSN-1979-2603.
- Abd Hannan & Zainuddin Syarif, "Agama dan Politik: Konstelasi Pemikiran Antara Kolompok Kultural dan Struktural pada Kalangan Kiai Pesantren di Madura", *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 1, (2020), pp, 47-74. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1174>.
- Abd Hannan, "Moderate Islam and Popular Pesantren Tradition: Strategy Strengthening Moderate Islam among Madurese Communities Through Islamic Boarding Schools-based Populer Tradition Values", *Journal Sosiologi Dialektika*, Vol. 13, No. 2, (2018), <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168>/online-ISSN: 2722-4322/Print-ISSN: 1858-0890.
- Abdul Halim, "gerakan sosial keagamaan nahdlatul ulama pada masa kebangkitan nasional", *Jurnal studi agama-agama dan lintas budaya*, Vol. 2, No. 1 (September 2017): 35-50./e-ISSN:2528-7249/p-ISSN:2528-7230.

- Ardhie Raditya, "Karakter Orang Madura, Nasionalisme, dan Globalisasi, *Jurnal Masyarakat Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 46, No. 1, (juni 2020), p-ISSN:0125-9989/p-ISSN: 2502-5694.
- Ilma Mardiana Asiyah, "Perlawanan Rakyat Bangkalan dalam Menghadapi Kembalinya Belanda pada Tahun 1947", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, (2020), <https://ejournal.unisa.ac.id/index.php/avatara/article/view/34454>.
- Ismatillah A. Nu'ad, "Gerakan Islam Konteks Lokal dan Global; Respon Pemikiran Sosial Politik dan Ekonomi Aktivis Gerakan Islam di Indonesia", *Portal Jurnal Online Kopertais IV*, Vol. IX, No. 1, (2016).
- Moh. Faridi, "Entolingoistik Falsafah Hidup Masyarakat Madura", *Journal of Education*, Vol. 1, No, 2, (Februari 2021), E-ISSN: 2746-8410
- Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)", *Jurnal Karsa* Vol. XI, No. 1, April (2007), <https://doi.org/10.19105/karsa.v11i1.144>/p-ISSN: 2442-3289/e-ISSN:2442-4285.
- Mohammad Syifa A. Widigdo, "Gerakan Islam Indonesia: Mengurai Belenggu, Membangun Peradaban" *Journal Islamic Word and Politics*, Vol. 2, No. 2, (Desember,2018),<https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp>/ISSN:2614-0535 (Print)/ISSN:26441330 (Online).
- Muhammad Kosim, "Kiai dan Blater, Elite lokal dalam Masyarakat Madura, *jurnal Karsa*", Vol. XII, No. 2, (Oktober 2007), <https://doi.org/10.19105/karsa.v11i1.144>/p-ISSN: 2442-3289/e-ISSN:2442-4285.
- Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas di Indonesia: Anatara Nasionalisme dan Agama, *Journal of politic Policy*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2018), <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>/e-ISSN:2655-7045.
- Zainal Alim, "Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren di Madura: Perspektif Kiai di Bangkalan", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 4, No. 2, (Nopember 2016), ISSN (p) 2089-1946& ISSN(e) 2527-4511 Hal. 250 – 270.

### **Skripsi**

- Ali Topan, 2020, *Cara Mengtasi Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP Mansyaul Ulum Tegal Sari Desa Banyupelle Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Husniah, 2018, *Perspektih Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daeah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*, Skripsi, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

### **Media Online**

- <https://www.koranmadura.com/2020/02>, Massa, Demo Kantor Pemkab Pamekasan, Minta Bupati Tutup KCM.
- <https://regional.compas/read/2020/10/05/15135341/>, Masa Bakar Tempat Wisata di Pamekasan Karena Diduga Jadi Sarang Maksiat.
- <https://news.okezone.com/amp/2020/12/17/519/2329769>, Ribuan Santri & Ulama di Madura Ingin Habib Rizieq di Bebaskan Tanpa Syarat.

<https://indopers.net/2020/12/16>, Ratusan Pendemo Datangi Mapolrs Sampang Madura Menuntut Pembebasan HRS.

<https://nasional.tempo.co/read/1410670>, Geruduk Rumah Mahfud MD, Massa Minta Rizieq Shihab Tak Diusik.

<https://madura.tribunnnews.com/amp/2019/11/22/>, Ulama Madura Unjuk Rasa Putri Soekarno, Sukmati yang Dianggap Menista, DPRD Pamekasan Mendukung.

<https://www.suara.com/news/2021/12/08/09721/> Aliansi Ulama Madura Sambagi Komisi III DPR RI minta Habib Rizieq Dibebaskan tanpa syara

